

Daftar Isi
Jurnal **Masyarakat dan Budaya**
Volume 18 No. 1 Tahun 2016

	Halaman
Pengantar Redaksi	iii
Topik:	
☞ Dari ‘Negara Islam’ Ke Politik Demokratis: Wacana dan Artikulasi Gerakan Islam Media <i>Online</i> di Mesir dan Indonesia <i>Ahmad Rizky Mardhatillah Umar</i>	1
☞ Fatwa KH. Ahmad Rifai Kalisalak Tentang Opium dan Rokok di Jawa Abad XIX <i>Ayang Utriza Yakin</i>	19
☞ Antara Ketaatan Beragama dan Toleransi Sosial: Membaca Pemikiran Guru Marzuki Muara di Betawi Tentang Kafir (1877-1934) <i>Agus Iswanto</i>	33
☞ Siasat Anak Jalanan Melawan Praktik Opresif di Makassar <i>Abu Bakar</i>	47
☞ Banjir, Pengendaliannya, Dan Partisipasi Masyarakat Di Surabaya, 1950-1976 <i>Sarkawi B. Husain</i>	65
☞ Perspektif Sosiologis Dalam Penanggulangan Bencana <i>Rudy Pramono</i>	81
☞ Structural Violation of Indigenous Human Rights in Indonesia: A Case Study of Merauke Integrated Food and Energy Estate (Mifee) In Papua <i>Dini Suryani</i>	97
☞ Modal Sosial Masyarakat Desa Rahtawu: Studi Kasus Pelestarian Hutan Muria di Kabupaten Kudus <i>Mochamad Widjanarko</i>	109
☞ “Berlayar Menuju Pulau Dewata” Migrasi Orang-Orang Bugis-Makassar ke Bali Utara <i>Johny A. Khusyairi, Abd. Latif, dan Samidi</i>	121
☞ Dinamika Nilai Gotong Royong dalam Pranata Sosial Masyarakat Nelayan: Studi Kasus Masyarakat Bulutui dan Pulau Nain, Sulawesi Utara <i>Dede Wardiat</i>	133
Tinjauan Buku:	
☞ Mencari Aktor Utama dalam Proses Pembuatan Kebijakan Agama <i>Usman</i>	147

PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang berbahagia

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nomor: 024/OPSK.1/HK/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016 maka pengelola Jurnal Masyarakat Budaya (JMB) mengalami sedikit perubahan. Perubahan dengan tujuan memperkuat tim pengelola itu meliputi bagian Penasihat Editorial, Mitra Bestari, Dewan Redaksi, Tenaga Pendukung dan Sekretariat. Kami mengucapkan ‘selamat bergabung’ kepada Bapak/Ibu/Sdr. semua. Kita harapkan dengan tim pengelola yang lebih kuat dan lengkap JMB akan menjadi lebih berkualitas dan semakin diminati, dicintai, oleh para pembaca yang lebih banyak di masa depan.

Pada edisi penerbitan ini tidak ada tema khusus yang menjadi fokus dan mengikat semua tulisan yang dimuat. Namun, semua tulisan tetap mengacu kepada upaya mendiskusikan persoalan kemasyarakatan dan kebudayaan dalam maknanya yang luas sebagai identitas pokok, misi dan tujuan dari JMB. Sesuatu yang mungkin akan segera nampak dari judul dan abstrak tulisan yang dipublikasikan adalah penekanannya pada studi kasus dengan berbagai variasinya. Aspek penting yang dibicarakan meliputi keagamaan, perkotaan, pengelolaan lingkungan dan dampaknya, kebencanaan, migrasi, serta sistem nilai budaya.

Diawali dengan artikel Ahmad Rizki Mardhatillah Umar tentang gerakan Islam di Mesir dan Indonesia. Tulisan ini membandingkan gerak langkah Ikhwanul Muslimin, sebuah gerakan Islam di Mesir, dengan Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia. Menurut penulis, kedua gerakan itu beranjak dari konsepsi universalis Islam dengan tujuan menjadikan Islam sebagai dasar negara. Hanya saja hasilnya berbeda karena perbedaan strategi, artikulasi, dan negosiasinya dengan kekuatan politik di masing-masing kedua negara. Setelah artikel gerakan Islam di atas, dilanjutkan dengan dua artikel keagamaan lainnya. Keduanya menggunakan pendekatan sejarah. Tulisan Ayang Utriza Yakin membicarakan fatwa KH. Ahmad Rifai Kalisasak tentang opium dan rokok di Jawa abad XIX. Selanjutnya, tulisan Agus Iswanto membahas mengenai ketaatan beragama dan toleransi sosial dalam kaitannya dengan soal kafir (1877-1934) berdasarkan pemikiran seorang ulama, Guru Marzuki Muara, di Betawi.

Abu Bakar melalui artikel hasil pengembangan tesis S2-nya mendiskusikan tentang siasat anak jalan di Kota Makassar menghadapi tindakan opresif yang mengitari mereka. Dengan memanfaatkan teori James C. Scott dan pendekatan etnografi, penulis sampai pada kesimpulan bahwa motivasi mendasar anak jalanan di wilayah perkotaan menghadapi praktik opresif adalah untuk keluar dari krisis subsistensi ekonomi. Selain anak jalanan, masalah perkotaan lainnya dalam publikasi ini adalah artikel Sarkawi B. Husain yang membahas masalah kebencanaan, fokusnya mengenai pengendalian banjir dan partisipasi masyarakat di Surabaya (1950-1976). Masih berkaitan dengan kebencanaan, Rudy Pramono menampilkan artikel tentang perubahan orientasi sebagai pemicu dalam penanganan bencana dan korbannya. Disebutkan bahwa pembahasan bencana masa lalu lebih berorientasi pada masalah teknis, namun dalam dua dekade terakhir orientasinya sudah lebih bersifat sosiologis, pendekatannya mengacu kepada kepentingan manusia dan masyarakat.

Artikel Dini Suryani membahas tentang keberadaan program pembangunan ekonomi Merauke Integrated Food and Energy (MIFEE) di Merauke, Papua. Program besar pemerintah ini bertujuan menghasilkan tanaman pangan dan bahan bakar hayati untuk pasar domestik dan internasional. Namun, karena memerlukan tanah yang sangat luas, pembangunannya melanggar hak-hak (tanah ulayat, ekonomi, sosial dan budaya) masyarakat sekitar. Artikel lingkungan lainnya hasil karya Mochammad Widjanarko yang menyoroti pengelolaan hutan Muria di Kabupaten Kudus dalam kaitannya dengan modal sosial masyarakat Desa Rahtawu.

Dua artikel berikutnya menyangkut migrasi dan nilai gotong royong. Johny A. Khuzairi, dkk., mengedepankan migrasi orang Bugis-Makassar ke Bali Utara. Soal penting yang dibahas ialah latar belakang terjadinya migrasi dan proses adaptasi mereka di daerah tujuan. Artikel nilai gotong royong

masyarakat nelayan Bulutui dan pulau Nain, Sulawesi Utara, ditulis oleh Dede Wardiat. Disebutkan bahwa nilai gotong royong baru muncul seiring dengan digunakannya alat tangkap baru oleh masyarakat setempat.

Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang sudah bersedia berbagi ilmu pengetahuan kepada semua pembaca JMB. Kami menginformasikan bahwa JMB sebentar lagi memasuki sistem pengelolaan e-jurnal, pada edisi ini mulai dirintis aplikasi programnya. Oleh karena itu di masa yang akan datang, JMB sebagai medium akademis, akan hadir di depan pembaca dengan artikel-artikel tentang kemasyarakatan dan kebudayaan yang lebih berkualitas, lebih bertanggung jawab, bebas plagiasi. Untuk itu kita semua dapat berkontribusi secara maksimal.

Selamat membaca.

**DARI 'NEGARA ISLAM' KE POLITIK DEMOKRATIS: WACANA
DAN ARTIKULASI GERAKAN ISLAM DI MESIR DAN INDONESIA***

**FROM 'ISLAMIC STATE' TO DEMOCRATIC POLITICS: DISCOURSES AND
ARTICULATIONS OF ISLAMIST MOVEMENT IN EGYPT AND
INDONESIA**

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar
Department of Politics, University of Sheffield
armumar1@sheffield.ac.uk

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan wacana dan artikulasi gerakan Islam di Mesir dan Indonesia. Di Mesir, Al-Ikhwan al-Muslimun telah menjelma menjadi sebuah kekuatan politik terpenting setelah pergantian rezim pada tahun 2011. Mereka telah berhasil menempatkan Mohammad Morsy dan Partai Keadilan Pembangunan dalam kekuasaan setelah memenangi Pemilu 2012. Di Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera juga menjelma sebagai kekuatan politik setelah Reformasi 1998, walaupun kesuksesan mereka tak sebesar Ikhwan. Dengan menggunakan pendekatan post-fondasionalis, artikel ini berupaya untuk menyediakan penjelasan tentang bagaimana wacana dan artikulasi Gerakan Islam di kedua negara tersebut diproduksi setelah pergantian rezim. Dengan melacak perjalanan politik dan sejarah Gerakan Islam di Mesir dan Indonesia, artikel ini berargumen bahwa kedua Gerakan Islam di Mesir dan Indonesia berangkat dari konsepsi universalis tentang Islam yang bertujuan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Secara garis besar, artikel ini menemukan bahwa ada perbedaan hasil yang diperoleh Gerakan Islam di dua negara tersebut, yang antara lain dipengaruhi oleh perbedaan strategi, artikulasi, dan negosiasi dengan kekuatan politik lain di negara tersebut.

Kata kunci: Islamisme, Mesir, Indonesia, wacana, artikulasi, Post-fondasionalisme

**FATWA KH. AHMAD RIFAI KALISALAK
TENTANG OPIUM DAN ROKOK DI JAWA ABAD XIX**

Ayang Utriza Yakin

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta,
Direktur *Indonesian Sharia Watch*, dan *SMRC Fellow* di PPIM-UIN Jakarta.
ayang.utriza@uinjkt.ac.id

Abstrak

Tulisan ini membahas fatwa Ahmad Rifai tentang Opium dan Rokok di dalam naskah yang berjudul *Bahs al-'Ifîâ'* (Pembahasan tentang Fatwa). Diskusi di dalam artikel ini hanya dibatasi pada fatwa tersebut untuk beberapa alasan. Pertama, fatwa ini adalah fatwa yang paling menarik dibandingkan dengan masalah-masalah yang ditemukan di dalam naskah. Hampir semua tema dan topik hanya terkait dengan soal-soal ibadah dan nasehat mengenai bagaimana sesuatu harus dilakukan. Contohnya, bagaimana melaksanakan ibadah haji, salat, dan puasa di satu sisi, dan terkait dengan soal-soal tasawuf, seperti taubat, tawakal, mujahadah, dan riya di sisi lain. Kedua, fatwa ini adalah fatwa terlengkap, walaupun hanya pendek, dan karenanya memungkinkan untuk

menganalisis fatwa yang dipilih itu lebih dalam. Penulis menggunakan pendekatan Filologi, Sejarah, dan Hukum. Mulanya, ia akan menyediakan alih aksara dari aksara Pegon ke aksara Latin dan alih bahasa dari bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia sebagai kerja filologis. Kemudian, penulis akan menganalisis fatwa dengan menggunakan pendekatan sejarah guna meletakkan teks dalam konteksnya dan memberikan latar belakang sejarah untuk fatwa tersebut. Akhirnya, penulis akan membicarakan fatwa itu dari pandangan hukum. Makalah ini akan mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan: apa fatwa Ahmad Rifai tentang Opium dan Rokok? Keadaan apa yang mendorong Rifai mengeluarkan fatwa demikian? Apa yang membedakan fatwanya dan fatwa ulama lain? Metode apa dan yang mana yang digunakan Rifai untuk mengeluarkan fatwa tersebut di atas? Sumbangsih utama dari tulisan ini adalah, pertama, menyediakan teks asli KH. Ahmad Rifai Kalisalak tentang rokok dan opium, dan, kedua, tulisan ini mengungkapkan bahwa Rifai adalah satu-satunya ulama yang perhatian pada masalah rokok dan opium pada abad ke-19 di Jawa.

Kata kunci: Ahmad Rifai, Bahsul Ifta, Pernikahan, Opium, Rokok, Ambon, Jawa

ANTARA KETAATAN BERAGAMA DAN TOLERANSI SOSIAL: MEMBACA PEMIKIRAN GURU MARZUKI MUARA DI BETAWI TENTANG KAFIR (1877-1934)

Agus Iswanto

Balai Litbang Agama Jakarta
agus.iswanto83@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini menyajikan karya dan pemikiran dari seorang ulama Jakarta atau Betawi dari akhir abad ke-19 dan awal ke-20, yakni Guru Marzuki. Tulisan ini berfokus pada pemikiran teologi atau kalam dengan pembahasan khusus pada masalah penilaian kafir, sebuah isu yang masih relevan sekarang. Sumber-sumber yang digunakan dalam tulisan ini adalah karya-karya Guru Marzuki, wawancara, dan sumber lain yang relevan dengan konteks kehidupan Guru Marzuki. Dari sisi aliran teologi, Guru Marzuki mengikuti mazhab 'Asy'ari. Dari karya-karyanya di bidang teologi, terungkap bahwa Guru Marzuki berdiri di antara 'disiplin dalam beragama' dengan toleransi kepada sesama Muslim. Secara individual, Guru Marzuki menekankan 'kedisiplinan' dalam akidah dan ibadah. Namun, dalam konteks relasi sosial sesama Muslim Guru Marzuki mengedepankan toleransi, terbukti dari pandangan yang hati-hati dalam memberi penilaian kafir. Pengungkapan pemikiran Guru Marzuki dapat menyumbangkan khazanah intelektual mengenai persoalan kafir yang hingga kini menjadi isu yang selalu muncul di Indonesia. Pemikiran Guru Marzuki memberikan kontribusi bagi sejarah pemikiran Islam moderat di Indonesia.

Kata kunci: pemikiran Islam, teologi, kafir, ulama Betawi-Indonesia, Guru Marzuki

SIASAT ANAK JALANAN MELAWAN PRAKTIK OPRESIF DI MAKASSAR

Abu Bakar

Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, UIN Alauddin Makassar
aboe.aboe09@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini mendiskusikan masalah kehidupan anak jalanan di Kota Makassar, dengan fokus pada motivasi dan resistensinya dalam menghadapi praktik-praktik opresif di sekelilingnya. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana siasat anak jalanan dalam

melawan praktik-praktik opresif. Untuk menggambarkannya, penulis menggunakan teori perlawanan sehari-hari James C. Scott dan pendekatan etnografi. Siasat anak jalanan dalam melawan praktik opresif ternyata didasarkan pada masalah subsistensi (ekonomi). Motivasi mendasar dari anak jalanan adalah keluar dari krisis subsistensi.

Kata kunci: siasat, praktik opresif, resistensi, anak jalanan, motivasi resistensi

BANJIR, PENGENDALIANNYA, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI SURABAYA, 1950-1976

Sarkawi B. Husain

Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Arilangga Surabaya
sarkawihusain@gmail.com

Abstrak

Selama pertengahan abad ke-20 hingga tahun 1970-an, banjir di Kota Surabaya menunjukkan eskalasi dan siklus yang semakin pendek. Faktor-faktor apa yang menyebabkan eskalasi tersebut dan apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam menanggulangi banjir yang melanda rumah dan kampung mereka? Melalui penelitian arsip, sejumlah surat kabar, dan wawancara, berbagai masalah tersebut dielaborasi. Studi ini menemukan bahwa banjir pada periode ini disebabkan antara lain oleh: (1) Meluapnya Kali Lamong yang berhulu di Kabupaten Lamongan dan Mojokerto; (2) Tindakan penduduk yang membobol tanggul Kali Pakis dan Kali Bratang Baru; (3) Sedimentasi kali, sampah, bangunan liar di bantaran kali dan kolong jembatan, serta berkurangnya wilayah resapan air. Untuk menanggulangi banjir, masyarakat melakukan berbagai upaya, baik perorangan maupun gotong-royong. Mereka yang memiliki dana yang banyak, meninggikan lantai rumahnya dan membeli pompa penyedot banjir, sedangkan yang tidak punya banyak uang, hanya membuat tanggul di depan pintu rumahnya. Kerja sama Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) menjadi sebuah mekanisme lain untuk mengontrol banjir.

Kata kunci: Banjir, Surabaya, pengendalian, masyarakat, partisipasi

PERSPEKTIF SOSIOLOGIS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Rudy Pramono

Universitas Pelita Harapan
rudy.pramono@uph.edu

Abstrak

Kajian tentang bencana dalam dekade terakhir menunjukkan terjadinya perubahan orientasi, yang semula lebih banyak membahas masalah teknis tentang kejadian yang memicu bencana dan penanganan korban bencana menjadi pendekatan yang menekankan pada pendekatan manusia dan masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan uraian perspektif sosiologis tentang pengelolaan bencana, yang membahas keragaman pemahaman, tanggapan dan pola masyarakat lokal menghadapi bencana dan pemahaman, tanggapan dan pola aktor atau organisasi eksternal dalam menghadapi, yang seringkali berkontestasi untuk dijadikan rujukan dalam pengelolaan bencana. Pengelolaan bencana merupakan pendekatan multidisiplin antara konsep, simpulan dan analisis dari sosiologi, administrasi publik dan berbagai disiplin ilmu lain. Dalam berbagai kejadian, bencana berkaitan dengan bagaimana pola pengetahuan individu atau masyarakat terhadap suatu ancaman bencana dan bagaimana pola mereka dalam menghadapi ancaman tersebut. Kegiatan perencanaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan proses belajar yang berkelanjutan menghadapi suatu ancaman,

bukan tujuan yang ada akhirnya. Perspektif sosiologis bukan hanya sekedar pengetahuan, namun suatu proses saling memahami antarpihak terkait dalam menyusun kegiatan program, prioritas dan strategi implementasi pengelolaan suatu ancaman bencana secara berkelanjutan. Jika strategi pengelolaan bencana menjadi acuan dalam tanggapan perilaku manusia atau kelompok sosial dalam menghadapi suatu ancaman bencana menjadi lebih efektif, maka strategi tersebut perlu dikembangkan dan diterapkan menjadi bagian hidup manusia atau kelompok yang mengalami suatu ancaman bencana dalam kehidupan sehari-hari.

Kata kunci: ancaman, bencana, sosiologis, kontestasi, respon

STRUCTURAL VIOLATION OF INDIGENOUS HUMAN RIGHTS IN INDONESIA: A CASE STUDY OF MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE (MIFEE) IN PAPUA

Dini Suryani

Pusat Penelitian Politik - LIPI

dini.suryani@lipi.go.id or dini.suryani19@gmail.com

Abstract

The Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) is a large-scale economic development program in Merauke, Papua. It aims to produce food crops and biofuels for domestic and international markets in a response of food and energy crises. Due to the extensive needs of land, this project has violated the property rights (rights to land) of indigenous community, the Malind people. It also has contravened the economic, social and cultural rights of Malind people seen from the decreasing of life quality. Using Galtung (1969) theory of structural violence that developed by Ho (2007) to human rights context, this paper argues that the Malind people have suffered structural violation on their human rights through the MIFEE project.

Keywords: structural violation, human rights, MIFEE, Papua

MODAL SOSIAL MASYARAKAT DESA RAHTAWU: STUDI KASUS PELESTARIAN HUTAN MURIA DI KABUPATEN KUDUS

Mochamad Widjanarko

Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus

widjanarkom@yahoo.com atau m.widjanarko@umk.ac.id

Abstrak

Permasalahan kerusakan ekosistem Muria sudah berlangsung demikian lama, tetapi belum tampak adanya upaya penyelesaian yang berarti, berbagai upaya yang dijalankan oleh berbagai pihak terlihat masih kurang efektif. Salah satu penyebab ketidakefektifan ini adalah lemahnya kolaborasi antarpihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di kawasan Muria. Masing-masing pihak yang berwenang dan berkepentingan belum mampu bersinergi dengan baik dan masih berjalan sendiri-sendiri. Beberapa inisiatif dari beberapa pihak, baik dari instansi pemerintah, universitas, LSM maupun masyarakat bermunculan, tetapi masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi. Selain itu, inisiatif tersebut tampaknya melupakan modal sosial yang ada dalam komunitas yang peduli dengan pelestarian hutan Muria. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui modal sosial yang ada di Desa Rahtawu dan bentuk modal sosial yang berkaitan dengan upaya pelestarian Hutan Muria. Melakukan

pendekatan fenomenologis, penulis berusaha menggali dan mengetahui modal sosial yang ada di Desa Rahtawu, Kabupaten Kudus melalui wawancara dan pengamatan terlibat. Hasil temuan menunjukkan bahwa: (a) terdapat modal sosial berupa norma sosial, kepercayaan dan jaringan; dan (b) bentuk modal sosial yang berhubungan dengan upaya pelestarian hutan Muria mencakup sedekah bumi, sambatan, tidak nanggap wayang, dan tidak menebang pohon sembarangan.

Kata kunci: *modal sosial, sedekah bumi, sambatan*

"BERLAYAR MENUJU PULAU DEWATA" MIGRASI ORANG-ORANG BUGIS-MAKASSAR KE BALI UTARA

Johny A. Khusyairi, Abd. Latif, dan Samidi

Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga Surabaya
johnykhusyairi@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan proses migrasi orang-orang Bugis-Makassar ke Bali Utara. Berdasarkan tradisi dan sejarah lisan, mereka sudah berada di Bali Utara sejak abad ke-17. Mereka bermukim di Kampung Bugis Buleleng, Penyabangan, Celukan Bawang, dan Sumberkima. Proses migrasi didorong oleh persoalan politik dan ekonomi. Persoalan politik berkaitan dengan kekalahan Makassar dan sekutunya melawan VOC pada tahun 1667/1669. Gelombang migrasi besar-besaran terjadi saat Sulawesi Selatan dilanda kekacauan akibat pemberontakan DI/TII Kahar Muzakkar. Persoalan ekonomi juga menjadi alasan penting dalam proses migrasi tersebut. Mereka berlayar ke berbagai kawasan untuk mencari teripang dan penyu untuk dijual ke Singapura. Dalam perjumpaan dengan orang-orang Bali yang memiliki adat-istiadat, orang-orang Bugis-Makassar tetap mampu menjaga identitas ke-Bugis-annya. Akan tetapi, terdapat beberapa aspek yang mulai hilang seperti bahasa dan rumah. Walaupun memiliki perbedaan keyakinan, orang-orang Bugis-Makassar mampu beradaptasi dengan orang-orang Bali. Bahasa dan perkawinan dengan orang Bali menjadi media untuk menjaga hubungan mereka dengan penduduk lokal.

Kata kunci: migrasi, Bugis-Makassar, Bali Utara, adaptasi

DINAMIKA NILAI GOTONG ROYONG DALAM PRANATA SOSIAL MASYARAKAT NELAYAN: STUDI KASUS MASYARAKAT BULUTUI DAN PULAU NAIN, SULAWESI UTARA

Dede Wardiat

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan - LIPI
dewadetar@yahoo.com

Abstrak

Dalam lingkungan masyarakat nelayan yang berada di bekas tempat persinggahan (*Daseng*), nilai gotong royong terkait erat dengan alat tangkap yang digunakan. Alat tangkap merupakan produk budaya dari komunitas yang merefleksikan pola kerja sama, solidaritas, serta sikap hidup dari penggunaannya. Penggunaan alat tangkap yang bersifat individual menyebabkan sikap individualisme penduduk relatif tinggi, sehingga berimbas pada kehidupan sosial mereka, termasuk solidaritas dan sikap gotong royong yang cenderung rendah. Seiring dengan perubahan alat tangkap yang digunakan, dari individual ke komunal, nilai gotong royong mulai diperkenalkan. Namun, hal itu hanya terinternalisasi dalam pembagian kerja di antara mereka. Dalam kehidupan sosial, mereka membentuk pranata sosial baru guna mewadahi kegiatan gotong royong di

antara warga masyarakat. Di tengah kondisi sosial seperti itu, pengenalan koperasi yang mensyaratkan kohesi sosial yang kuat bisa jadi terlalu prematur karena keberadaan pranata sosial tersebut cenderung dijadikan instrumen oleh elit lokal untuk mengeksploitasi mereka. Dengan kondisi seperti ini, tampaknya diperlukan format pranata sosial baru yang sesuai dengan kondisi sosial yang ada. Dalam konteks ini, orientasi terhadap kebutuhan masyarakat setempat harus menjadi titik awal pembangunan kelembagaan di lingkungan mereka.

Kata kunci: alat tangkap, gotong royong, pranata sosial.